

## Pola Aktivitas Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dengan Pendekatan *Static Location Quotient* (SLQ)

Albertus Girik Allo\*  
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Papua

Article History:  
Received: June 14, 2021  
Accepted: July 7, 2021

\*Corresponding Author:  
E-mail:  
[ag.allo@unipa.ac.id](mailto:ag.allo@unipa.ac.id)

### **Abstract**

*The purpose of this study was analysis at the pattern of economic activity in districts/cities in West Papua Province. The analytical method used Static Location Quotient (SLQ) approach. Data used is GDP in districts/cities in West Papua Province from 2010 – 2020. The results show that the base sector in the main district in West Papua Province is similar except for Sorong Regency. In addition, there is a trend of decreasing SLQ values in the main district and conversely, there is a trend of increasing SLQ values in newly districts in West Papua Province.*

**Keywords:** *Economic activity pattern, Static Location Quotient (SLQ), Base sector*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola aktivitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan Static Location Quotient (SLQ). Data yang digunakan adalah PDRB kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2010 – 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor basis pada kabupaten induk di Provinsi Papua Barat memiliki kemiripan kecuali Kabupaten Sorong. Selain itu, terdapat trend penurunan nilai SLQ pada kabupaten induk dan sebaliknya terdapat trend peningkatan nilai SLQ pada kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat.

**Kata Kunci:** Pola aktivitas ekonomi, *Static Location Quotient* (SLQ), Sektor basis.

## **PENDAHULUAN**

Aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan dari kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha terhadap total output wilayah tersebut. Semakin besar kontribusi sektor maka dapat dikatakan bahwa sektor tersebut merupakan *leading sector* pada wilayah tersebut. Strategi pertumbuhan ekonomi “*leading sector*” menggambarkan bagaimana sebuah sektor yang secara inheren merupakan sumber kegiatan ekonomi skala besar yang dapat memunculkan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi (Currie, 1974). *Leading sector* dalam pembangunan ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai ketergantungan sektor lain terhadap sektor tertentu baik melalui pendapatan yang dihasilkan maupun permintaan akhir yang dapat dilihat dari hubungan antar

industri (Hanson, 1976). Sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik di Indonesia membuat pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dalam mendukung *leading sector* agar memberikan manfaat semakin besar bagi sektor lainnya.

Penelitian tentang *leading sector* di Indonesia telah banyak dilakukan baik yang bersifat umum (Indonesia) maupun regional (provinsi atau kabupaten/kota). *Leading sector* pada beberapa riset disebut juga dengan sektor basis atau sektor unggulan. Setiap provinsi di Indonesia memiliki sektor basis yang berbeda-beda yang memungkinkan untuk membentuk spesialisasi suatu daerah (Rahman et al., 2020). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa sektor basis di kabuapten tersebut adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Industri Pengolahan (Safri & Rachmadi, 2017). Sektor unggulan di Kabupaten Rokan Hulu adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri Pengolahan (Putra et al., 2017). *Leading sector* untuk Kota Blitar yaitu: (a) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (b) Informasi dan Komunikasi; dan (c) Jasa Keuangan dan Asuransi (Satrianto & Sasongko, 2019). Penelitian yang dilakukan pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri, Sragen, Boyolali, Semarang, Kendal, Kebumen, dan Purworejo memiliki keunggulan pada sektor primer (Soebagiyo & Hascaryo, 2016).

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi di bagian Timur Indonesia yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat sebesar 6,25 persen yang kemudian pada awal masa pandemi (tahun 2019) mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 2,66 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 0,77 persen (BPS Papua Barat, 2021b). Salah satu faktor yang menyebabkan kontraksi tersebut adalah menurunnya kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian. Penurunan kontribusi dari sektor tersebut lebih disebabkan oleh penurunan harga minyak dan gas bumi pada pasar dunia.

Struktur perekonomian Provinsi Papua Barat saat ini masih di dominasi oleh sektor primer (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian). Kedua sektor ini menyumbang 28,13 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat (BPS Papua Barat, 2021a). Subsektor lain yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Papua Barat adalah Pengilangan Migas sebesar 22,93 persen. Data-data tersebut menunjukkan bahwa PDRB Papua Barat sangat ditopang oleh sektor Migas.

Ketimpangan struktur perekonomian Provinsi Papua Barat dapat dilihat dari persandingan dua indikator yaitu kontribusi sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut. Tabel 1 menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Papua Barat namun memiliki kontribusi yang rendah terhadap PDRB. Sebaliknya, Sektor Pertambangan dan Penggalan, Sektor Industri Pengolahan, serta Sektor Konstruksi yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB namun hanya menyerap tenaga kerja kurang dari 15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih rendah.

**Tabel 1. Distribusi PDRB berdasarkan ADHB dan distribusi Tenaga kerja berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat, 2019 – 2020**

	2019		2020	
	ADHB	Tenaga Kerja	ADHB	Tenaga Kerja
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,55%	33,45%	10,63%	32,40%
B. Pertambangan dan Penggalan	17,44%	2,27%	17,05%	1,71%
C. Industri Pengolahan	25,74%	5,86%	26,03%	5,08%
F. Konstruksi	15,96%	6,30%	14,62%	6,06%
Lainnya	30,31%	52,12%	31,67%	54,75%

Sumber: (BPS Papua Barat, 2021c)

Pada tahun 2015, Provinsi Papua Barat mencanangkan diri sebagai Provinsi Konservasi yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Berbagai kondisi diatas secara tidak langsung akan mempengaruhi pola aktivitas ekonomi di Provinsi Papua Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola aktivitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dengan pendekatan Static Location Quotient (SLQ).

## **METODE PENELITIAN**

### **Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010. Periode data yang diambil adalah 2010 – 2020. Dalam analisis akan dilakukan beberapa periodisasi untuk mendapatkan pola perubahan aktivitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Analisis ini juga menggunakan 17 sektor lapangan usaha dalam PDRB.

**Tabel 2. Kode lapangan usaha dalam PDRB**

Kode	Sektor	Sub Sektor
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanaman Pangan</li> <li>b. Tanaman Hortikultura Semusim</li> <li>c. Perkebunan Semusim</li> <li>d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya</li> <li>e. Perkebunan Tahunan</li> <li>f. Peternakan</li> <li>e. Jasa Pertanian dan Perburuan</li> </ol> </li> <li>2. Kehutanan dan Penebangan Kayu</li> <li>3. Perikanan</li> </ol>
B	Pertambangan dan Penggalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi</li> <li>2. Pertambangan Batubara dan Lignit</li> <li>3. Pertambangan Bijih Logam</li> <li>4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya</li> </ol>
C	Industri Pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Industri Batu Bara</li> <li>b. Pengilangan Migas</li> </ol> </li> <li>2. Industri Makanan dan Minuman</li> <li>3. Industri Pengolahan Tembakau</li> <li>4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi</li> <li>5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki</li> <li>6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya</li> <li>7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman</li> <li>8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional</li> <li>9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik</li> <li>10. Industri Barang Galian bukan Logam</li> <li>11. Industri Logam Dasar</li> <li>12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik</li> <li>13. Industri Mesin dan Perlengkapan</li> <li>14. Industri Alat Angkutan</li> <li>15. Industri Furnitur</li> <li>16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan</li> </ol>
D	Pengadaan Listrik dan Gas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketenagalistrikan</li> <li>2. Pengadaan Gas dan Produksi Es</li> </ol>
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	
F	Konstruksi	

Kode	Sektor	Sub Sektor
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
H	Transportasi dan Pergudangan	1. Angkutan Rel 2. Angkutan Darat 3. Angkutan Laut 4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 5. Angkutan Udara 6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1. Penyediaan Akomodasi 2. Penyediaan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1. Jasa Perantara Keuangan 2. Asuransi dan Dana Pensiun 3. Jasa Keuangan Lainnya 4. Jasa Penunjang Keuangan
L	Real Estat	
M,N	Jasa Perusahaan	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	
P	Jasa Pendidikan	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	
R,S,T,U	Jasa lainnya	

## Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah metode Location Quotient (LQ). Secara umum, model LQ ada dua yaitu Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). Model DLQ merupakan modifikasi dari SLQ. Ada tiga asumsi utama dalam LQ (Arsyad, 1999), yaitu: (1) Semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat daerah referensi (pola pengeluaran secara geografis adalah sama); (2) Produktivitas tenaga kerja adalah sama; dan (3) Setiap industri menghasilkan barang yang sama (homogen). Rumus dari SLQ sebagai berikut:

$$SLQ = \frac{V_{ik}/V_k}{V_{ip}/V_p}$$

Dimana:

$V_{ik}$  = Nilai output sektor ke-i dalam PDRB ADHK kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat

$V_k$  = Nilai PDRB ADHK kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat

$V_{ip}$  = Nilai output sektor ke-i dalam PDRB ADHK Provinsi Papua Barat

$V_p$  = Nilai PDRB ADHK Provinsi Papua Barat

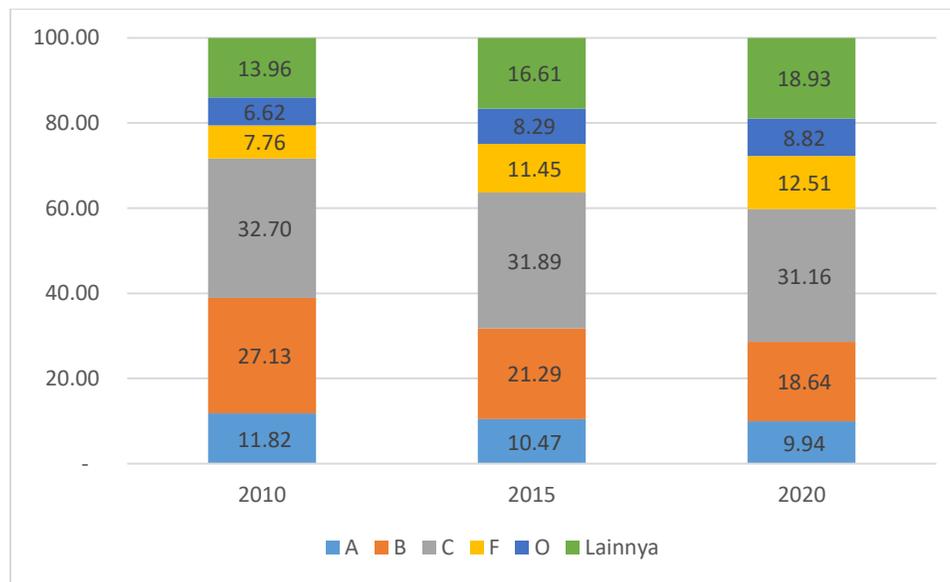
Kriteria penilaian:

1. Jika nilai SLQ sektor  $i=1$ , artinya laju pertumbuhan sektor  $i$  di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Papua Barat.
2. Jika nilai SLQ sektor  $i>1$ , artinya laju pertumbuhan sektor  $i$  di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat adalah lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Papua Barat. Sektor  $i$  merupakan sektor unggulan di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut.
3. Jika nilai SLQ sektor  $i<1$ , artinya laju pertumbuhan sektor  $i$  di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat adalah lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Papua Barat. Sektor  $i$  bukan merupakan sektor unggulan di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat sekaligus bukan merupakan basis ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kontribusi Sektor terhadap PDRB**

Pada periode 2010 – 2020 menunjukkan bahwa pola aktivitas ekonomi di Provinsi Papua tidak mengalami perubahan. Lima sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Provinsi Papua Barat yaitu: (1) Sektor Industri Pengolahan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (4) Konstruksi; dan (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Peranan dari kelima sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Papua Barat mengalami penurunan terutama untuk Sektor Industri Pengolahan sebesar (4,69 persen); Sektor Pertambangan dan Penggalian (-31,30); serta Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,91 persen) dalam rentang waktu 2010 – 2020. Walaupun terus mengalami penurunan, namun kontribusi kelima sektor tersebut dalam perekonomian dalam rentang waktu yang sama masih diatas 80 persen per tahun.



**Gambar 1. Kontribusi per sektor terhadap PDRB ADHK Provinsi Papua Barat tahun 2010, 2015, dan 2020.**

Pola aktivitas ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dalam periode waktu 2010 – 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan sektor terhadap PDRB masing-masing kabupaten/kota, dimana lima sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB tidak mengalami perubahan. Namun, *leading sector* pada beberapa kabupaten/kota mengalami perubahan, yaitu:

1. Kabupaten Fakfak memiliki *leading sector* pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2010 yang kemudian mengalami perubahan menjadi sektor Konstruksi pada tahun 2015 hingga 2020.
2. Kabupaten Manowkari memiliki *leading sector* pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2010 yang kemudian mengalami perubahan menjadi sektor Konstruksi pada tahun 2015 dan mengalami perubahan lagi pada tahun 2020 menjadi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
3. Kabupaten Sorong Selatan memiliki *leading sector* pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2010 dan 2015 yang kemudian mengalami perubahan menjadi sektor Konstruksi pada tahun 2020.
4. Kabupaten Maybrat memiliki *leading sector* pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2010 dan 2015 yang kemudian mengalami perubahan menjadi

sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada tahun 2020.

5. Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki *leading sector* pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2015 yang kemudian mengalami perubahan menjadi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada tahun 2020.
6. Kota Sorong memiliki *leading sector* pada sektor Konstruksi pada tahun 2010 dan 2015 yang kemudian mengalami perubahan menjadi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020.

Perubahan *leadings sector* secara teori akan terjadi realokasi sumber daya dari sektor yang memiliki produktivitas rendah ke sektor yang memiliki produktivitas tinggi. Umumnya, perubahan *leading sector* biasanya terjadi dari sektor pertanian ke sektor manufaktur (Chenery et al., 1986) tetapi juga terhadap perubahan dari sektor pertanian ke sektor jasa (ADB, 2013; Timmer et al., 2015). Sebagian besar perubahan *leading sector* di Provinsi Papua Barat dari pertanian menuju sektor jasa. Hal ini terjadi di Kabupaten Fakfak, Manokwari, Sorong Selatan, dan Maybart, Pegunungan Arfak. Perubahan ini diharapkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat pada wilayah-wilayah tersebut. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan aktivitas ekonomi dari sektor pertanian menjadi sektor manufaktur maupun jasa akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menyerap modal yang lebih banyak, dan perubahan teknologi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Felipe et al., 2014; Rodrik, 2013).

Sektor-sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar dalam aktivitas ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sangat terbatas. Pada tahun 2010, hanya terdapat 7 sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Kondisi pada tahun 2015 lebih baik dibandingkan di tahun 2010 dimana pada tahun tersebut terdapat 9 sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2021 kemudian bertambah satu sektor sehingga menjadi 10 sektor. Namun, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Konstruksi; serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan tiga sektor yang selalu ada pada periode tersebut dan disetiap kabupaten/kota.

**Tabel 3. Kontribusi per sektor terhadap PDRB ADHK masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 2010, 2015, dan 2020**

Kabupaten/Kota	2010		2015		2020	
	Kode	Nilai	Kode	Nilai	Kode	Nilai
Fakfak	A	23,67	F	25,20	F	25,30
	F	22,17	A	18,73	O	17,89
	O	16,41	O	17,90	A	17,62
	G	11,60	G	12,01	G	12,79
	P	5,42	P	5,31	P	5,34
Kaimana	A	40,12	A	30,50	A	28,40
	O	18,30	O	21,83	O	19,78
	F	11,23	F	16,37	F	18,34
	G	9,18	G	9,79	G	11,40
	C	7,29	C	6,50	C	6,13
Teluk Wondama	A	45,09	A	36,92	A	34,36
	O	22,29	O	25,36	O	26,66
	F	11,55	F	16,07	F	16,39
	G	7,04	G	7,39	G	8,09
	P	3,75	P	3,54	P	3,41
Teluk Bintuni	C	50,61	C	54,99	C	54,35
	B	43,06	B	38,21	B	34,29
	A	3,16	A	2,74	F	6,00
	O	1,14	F	1,51	A	2,50
	F	1,10	O	1,48	O	1,64
Manokwari	A	24,94	F	23,61	O	19,36
	F	17,64	O	17,25	F	18,74
	O	15,84	A	14,38	A	14,42
	G	10,69	G	11,93	G	14,04
	P	5,02	H	5,42	J	4,99
Sorong Selatan	A	34,25	A	27,74	F	26,98
	F	19,96	F	27,52	A	24,29
	O	19,76	O	19,43	O	20,23
	G	8,26	G	8,65	G	11,29
	P	5,66	P	5,44	P	5,61
Sorong	C	47,78204	C	48,65	C	47,71
	B	28,12464	B	20,85	B	17,35
	A	9,031566	A	9,36	F	11,10
	F	5,546254	F	8,48	A	9,02
	O	3,957351	O	5,80	O	6,70
Raja Ampat	B	53,25	B	44,76	B	38,11
	A	24,85	A	26,03	A	26,34
	O	11,28	O	13,02	O	15,53
	F	4,28	F	8,52	F	11,10

Kabupaten/Kota	2010		2015		2020	
	Kode	Nilai	Kode	Nilai	Kode	Nilai
Tambrauw	G	2,70	G	3,39	G	4,27
	C	47,78	C	48,65	C	47,71
	B	28,12	B	20,85	B	17,35
	A	9,03	A	9,36	A	9,02
	F	5,55	F	8,48	F	11,10
	O	3,96	O	5,80	O	6,70
Maybrat	A	40,03	A	35,05	O	37,04
	O	32,86	O	34,68	A	30,18
	F	11,25	F	14,19	F	15,12
	G	5,83	G	6,25	G	6,79
	P	3,55	P	3,29	P	3,43
Manokwari Selatan			A	66,84	A	60,53
			O	17,47	O	21,78
			P	3,36	F	3,65
			F	3,08	P	3,64
			H	2,56	H	2,53
Pegunungan Arfak			A	45,68	O	49,68
			O	40,22	A	34,48
			F	7,13	F	9,12
			P	3,82	P	3,70
			Q	1,46	Q	1,24
Kota Sorong	F	19,53	F	25,05	G	21,04
	G	17,97	G	17,69	F	18,47
	A	11,08	O	10,10	O	9,94
	O	8,90	A	8,13	A	9,23
	C	8,32	H	6,90	J	8,03

### ***Analisis Static Location Quotient (SLQ)***

LQ merupakan salah satu teknik analisis kualitatif yang dibutuhkan untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah. Selain itu, analisis LQ juga dapat digunakan untuk melihat derajat kemandirian suatu sektor (Widodo, 2006). Analisis LQ membagi kegiatan ekonomi dalam dua kategori yaitu sektor basis dan non-basis. Sektor basis menunjukkan bahwa sektor tersebut mampu melayani permintaan dalam daerah itu sendiri maupun di luar daerah tersebut. Sedangkan sektor non-basis hanya mampu melayani permintaan di daerah tersebut.

Hasil analisis LQ untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki sektor basis yang sama pada periode 2010 – 2020. Data Tabel 4 menunjukkan beberapa hal, yaitu:

1. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor basis bagi sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
2. Sembilan kabupaten (Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Manokwari, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak) merupakan kabupaten dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor basis.
3. Kabupaten Raja Ampat dan Teluk Bintuni merupakan dua kabupaten yang memiliki sektor basis pada sektor Pertambangan dan Penggalian.
4. Kabupaten Sorong dan Tambrauw hanya memiliki satu sektor basis yaitu sektor Industri Pengolahan.

Tabel 4 juga memberikan arti bahwa semakin banyak sektor basis dalam suatu wilayah (kabupaten/kota) maka pola aktivitas ekonomi wilayah tersebut juga semakin bervariasi. Sebagian besar kabupaten induk<sup>1</sup> di Provinsi Papua Barat memiliki sektor basis lebih dari 10 sektor basis kecuali Kabupaten Sorong. Kabupaten pemekaran yang memiliki kemajuan dalam aktivitas ekonominya jika dilihat dari keberadaan sektor basis adalah Kabupaten Kaimana. Kabupaten Kaimana merupakan kabupaten pemekaran dengan sektor basis terbanyak. Sedangkan Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten pemekaran dengan hanya memiliki satu sektor basis yaitu sektor Industri Pengolahan.

Secara umum, hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kabupaten induk di Provinsi Papua Barat kecuali Kabupaten Sorong cenderung mengalami penurunan kemandirian pada setiap sektornya. Kondisi ini ditunjukkan dari pertumbuhan nilai SLQ baik pada periode 2011 – 2020 atau 2016 – 2020, dimana pertumbuhan SLQ yang positif pada kabupaten induk selain Kabupaten Sorong cenderung negatif. Kabupaten pemekaran yang mengalami peningkatan pertumbuhan LQ pada setiap sektornya adalah Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Tambrauw. Walaupun peningkatan tersebut belum menyebabkan sektor tersebut dikatakan mandiri tetapi jika dilihat dari *trend* pertumbuhannya, maka sektor-sektor tersebut berpotensi sebagai sektor basis pada masa yang akan datang.

Rata-rata nilai SLQ untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat dari tahun 2010 – 2020 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta

---

<sup>1</sup> Kabupaten induk dalam penelitian ini adalah kabupaten pada awal berdirinya Provinsi Irian Jaya Barat yang saat ini bernama Papua Barat berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yaitu: Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, dan Kota Sorong.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial merupakan dua sektor yang memberikan nilai SLQ terbesar yaitu 2,38 dan 2,14 secara berturut-turut. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa nilai LQ untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,91 selama periode 2005 – 2013 (Baransano et al., 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih merupakan sektor unggulan bagi Provinsi Papua Barat walaupun kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Papua Barat serta kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan.

Nilai LQ pada Tabel 4 dapat digunakan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar sektor antar wilayah. Kabuapten/Kota yang memiliki sektor basis yang sama dapat membuat suatu klaster sehingga *multiplier effect* dari sektor tersebut akan semakin tinggi. Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Manokwari, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, Manokwari Seltan, dan Pegunungan Arfak dapat membuat satu klaster sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Keuntungan lain dari adanya klaster sektor adalah penurunan tingkat ketimpangan antar wilayah (Castells-Quintana & Royuela, 2014; Yu et al., 2012). Teori New Economic Geography (NEG) juga menunjukkan bahwa klasterisasi dapat mengurangi biaya produksi (Krugman, 1991; McCann et al., 2002), peningkatan penyerapan tenaga kerja (Delgado et al., 2014), dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Hanson, 2005; Njøs & Jakobsen, 2016).

**Tabel 4. Nilai, pertumbuhan LQ pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, 2010 – 2020**

Kode	Kabupaten Teluk Wondama							Kabupaten Manokwari						
	Tahun			Rerata Nilai LQ		Rerata Growth		Tahun			Rerata Nilai LQ		Rerata Growth	
	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020
A	3,81	3,53	3,46	3,59	3,48	(1,58)	(0,75)	2,11	1,37	1,45	1,48	1,40	(3,52)	1,47
B	0,04	0,06	0,07	0,06	0,07	6,05	3,17	0,11	0,13	0,15	0,13	0,14	3,38	4,72
C	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	(0,75)	0,09	0,13	0,12	0,15	0,13	0,13	2,36	7,10
D	0,53	0,46	0,47	0,48	0,48	(0,93)	(1,07)	2,94	2,48	2,33	2,47	2,30	(2,46)	(0,51)
E	0,47	0,48	0,43	0,46	0,45	(1,31)	(2,51)	3,02	2,92	3,27	3,03	3,05	1,14	2,87
F	1,49	1,40	1,31	1,38	1,30	(0,87)	(0,42)	2,27	2,06	1,50	1,98	1,78	(3,98)	(6,90)
G	1,41	1,27	1,15	1,24	1,17	(1,83)	(1,62)	2,14	2,04	2,00	2,04	1,93	(0,38)	0,72
H	0,99	0,91	0,89	0,91	0,86	(1,56)	0,59	2,42	2,30	1,68	2,24	2,07	(3,71)	(6,69)
I	0,92	0,82	0,70	0,79	0,72	(2,67)	(2,46)	3,06	2,84	2,82	2,85	2,73	(0,66)	0,88
J	0,35	0,30	0,25	0,30	0,28	(3,77)	(3,82)	2,74	2,53	2,18	2,49	2,31	(2,17)	(2,24)
K	1,19	0,83	1,00	0,90	0,86	(1,06)	5,19	2,79	2,87	2,62	2,77	2,65	(0,33)	(1,23)
L	1,48	1,40	1,28	1,36	1,28	(1,44)	(0,89)	2,90	2,90	2,46	2,80	2,64	(1,78)	(3,60)
M,N	0,67	0,62	0,57	0,61	0,57	(1,97)	(1,09)	2,62	2,36	2,12	2,38	2,20	(2,17)	(1,95)
O	3,36	3,06	3,02	3,09	3,03	(1,04)	(0,02)	2,39	2,08	2,19	2,10	2,02	(0,68)	1,97
P	1,71	1,45	1,33	1,46	1,34	(2,72)	(1,12)	2,29	2,00	1,82	2,02	1,92	(2,28)	(1,85)
Q	1,12	0,99	0,92	0,96	0,90	(1,72)	(0,56)	2,91	2,49	2,62	2,54	2,41	(0,74)	2,39
R,S,T,U	0,71	0,70	0,68	0,70	0,68	(0,79)	(0,51)	2,76	2,21	2,18	2,24	2,10	(2,22)	0,55

Lanjutan Tabel 5

Kode	Kabupaten Manokwari Selatan						Kabupaten Pegunungan Arfak							
	Tahun		Rerata Nilai LQ		Rerata Growth		Tahun		Rerata Nilai LQ		Rerata Growth			
	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020
A	6,38	6,09	6,33	6,24	(0,79)	(1,32)	4,36	3,47	4,27	4,06	(3,78)	(5,82)		
B	0,02	0,03	0,03	0,03	2,68	2,81	0,01	0,01	0,01	0,01	0,77	(0,32)		
C	0,03	0,04	0,03	0,03	2,73	4,85		0,00						
D	3,51	3,18	3,35	3,33	(0,78)	(2,11)	5,30	4,11	4,96	4,70	(3,37)	(6,50)		
E		0,33												
F	0,27	0,29	0,26	0,26	2,15	3,76	0,62	0,73	0,59	0,62	5,44	5,66		
G	0,20	0,18	0,19	0,18	(1,74)	(2,01)	0,01	0,01	0,01	0,02	10,40	23,84		
H	1,09	1,10	1,10	1,07	(1,02)	0,53	0,02	0,03		0,02		18,37		
I	0,61	0,78	0,68	0,74	3,51	7,33	0,24	0,25		0,25		(1,52)		
J	0,13	0,12	0,13	0,12	(1,30)	(1,86)	0,03	0,02		0,02		(7,41)		
K	0,39	0,64	0,42	0,45	8,37	14,73	0,05	0,13		0,06		50,02		
L	0,28	0,23	0,26	0,25	(2,54)	(4,26)	0,50	0,31	0,46	0,39	(7,45)	(10,20)		
M,N	0,83	0,75	0,82	0,79	(1,86)	(2,17)		0,06						
O	2,11	2,47	2,20	2,30	2,49	3,96	4,85	5,63	4,99	5,05	1,87	4,59		
P	1,38	1,42	1,40	1,42	0,46	0,30	1,57	1,45	1,56	1,50	(1,70)	(1,82)		
Q	1,72	1,75	1,69	1,65	0,16	1,36	1,97	1,45	1,87	1,71	(4,43)	(6,75)		
R,S,T,U	4,36	4,18	4,29	4,18	(0,78)	(0,66)	1,36	1,13	1,31	1,23	(3,33)	(4,37)		

Lanjutan Tabel 5.

Kode	Kabupaten Tambrauw							Kabupaten Sorong						
	Tahun			Rerata Nilai LQ		Rerata Growth		Tahun			Rerata Nilai LQ		Rerata Growth	
	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020
A	0,76	0,89	0,91	0,88	0,90	1,37	(0,09)	0,76	0,89	0,91	0,88	0,90	1,37	(0,09)
B	1,04	0,98	0,93	1,01	1,01	(1,37)	(2,47)	1,04	0,98	0,93	1,01	1,01	(1,37)	(2,47)
C	1,46	1,53	1,53	1,50	1,51	0,63	0,81	1,46	1,53	1,53	1,50	1,51	0,63	0,81
D	0,39	0,45	0,70	0,54	0,67	7,40	3,86	0,39	0,45	0,70	0,54	0,67	7,40	3,86
E	0,44	0,54	0,56	0,54	0,57	2,18	(0,52)	0,44	0,54	0,56	0,54	0,57	2,18	(0,52)
F	0,71	0,74	0,89	0,77	0,82	2,84	3,55	0,71	0,74	0,89	0,77	0,82	2,84	3,55
G	0,45	0,47	0,48	0,47	0,48	1,44	0,11	0,45	0,47	0,48	0,47	0,48	1,44	0,11
H	0,26	0,24	0,26	0,24	0,24	(0,00)	1,84	0,26	0,24	0,26	0,24	0,24	(0,00)	1,84
I	0,30	0,35	0,39	0,35	0,37	2,51	1,70	0,30	0,35	0,39	0,35	0,37	2,51	1,70
J	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	(1,13)	(0,79)	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	(1,13)	(0,79)
K	0,35	0,41	0,43	0,40	0,42	2,50	0,68	0,35	0,41	0,43	0,40	0,42	2,50	0,68
L	0,27	0,29	0,33	0,29	0,31	2,23	2,32	0,27	0,29	0,33	0,29	0,31	2,23	2,32
M,N	0,47	0,53	0,56	0,54	0,57	1,54	0,06	0,47	0,53	0,56	0,54	0,57	1,54	0,06
O	0,60	0,70	0,76	0,69	0,73	2,69	1,49	0,60	0,70	0,76	0,69	0,73	2,69	1,49
P	0,58	0,63	0,64	0,63	0,65	0,95	(0,37)	0,58	0,63	0,64	0,63	0,65	0,95	(0,37)
Q	0,46	0,52	0,57	0,52	0,55	2,60	1,36	0,46	0,52	0,57	0,52	0,55	2,60	1,36
R,S,T,U	0,27	0,29	0,30	0,29	0,29	1,31	0,74	0,27	0,29	0,30	0,29	0,29	1,31	0,74

Lanjutan Tabel 5.

Kode	Kota Sorong							Kabupaten Raja Ampat						
	Tahun			Rerata Nilai LQ		Rerata Growth		Tahun			Rerata Nilai LQ		Rerata Growth	
	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020
A	0,94	0,78	0,93	0,83	0,82	0,73	5,51	2,10	2,48	2,65	2,53	2,64	1,16	0,86
B	0,08	0,06	0,07	0,07	0,07	(0,27)	3,53	1,96	2,10	2,05	2,02	1,98	0,95	(0,18)
C	0,25	0,20	0,19	0,20	0,19	(2,79)	(0,24)	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	1,41	2,68
D	3,60	2,69	2,51	2,80	2,50	(3,51)	(0,89)	0,20	0,25	0,31	0,25	0,28	3,81	5,50
E	3,77	2,92	2,69	3,02	2,70	(3,74)	(1,34)	0,10	0,13	0,14	0,13	0,14	2,34	2,44
F	2,52	2,19	1,48	2,05	1,87	(4,55)	(8,29)	0,55	0,74	0,89	0,78	0,90	4,38	3,13
G	3,60	3,03	3,00	3,08	2,89	(1,57)	1,30	0,54	0,58	0,61	0,58	0,59	0,90	1,07
H	3,69	2,93	3,29	3,08	2,91	(0,92)	3,71	0,22	0,22	0,24	0,23	0,23	(0,20)	2,24
I	3,52	2,73	2,55	2,78	2,49	(3,26)	(0,08)	0,76	0,94	0,54	0,89	0,88	(3,75)	(10,45)
J	4,28	3,59	3,51	3,61	3,40	(1,88)	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	(1,45)	0,53
K	3,74	3,00	2,74	3,11	2,83	(3,00)	(2,04)	0,38	0,32	0,39	0,35	0,35	0,07	4,23
L	3,20	2,59	2,43	2,63	2,43	(2,73)	(0,78)	0,42	0,49	0,50	0,49	0,51	0,95	0,39
M,N	4,09	3,16	2,97	3,24	2,88	(3,23)	(0,36)	0,17	0,19	0,20	0,19	0,20	0,56	0,90
O	1,34	1,22	1,13	1,20	1,15	(1,65)	(0,75)	1,70	1,57	1,76	1,68	1,74	0,16	2,57
P	3,18	2,58	2,45	2,62	2,41	(2,55)	(0,48)	0,39	0,38	0,38	0,40	0,38	(1,33)	(0,00)
Q	3,11	2,53	2,27	2,59	2,34	(3,10)	(1,69)	0,33	0,31	0,29	0,31	0,30	(1,74)	(1,25)
R,S,T,U	4,28	3,43	3,09	3,52	3,20	(3,52)	(1,56)	0,51	0,66	0,81	0,69	0,79	4,18	3,87

Lanjutan Tabel 5.

Kode	Kabupaten Sorong Selatan							Kabupaten Teluk Bintuni						
	Tahun			Rerata Nilai LQ		Rerata Growth		Tahun			Rerata Nilai LQ		Rerata Growth	
	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020
A	2,90	2,65	2,44	2,66	2,50	(2,52)	(1,49)	0,27	0,26	0,25	0,26	0,26	(0,79)	(0,45)
B	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13	2,48	0,89	1,59	1,79	1,84	1,77	1,85	1,86	0,22
C	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,88	1,55	1,72	1,74	1,72	1,78	0,92	(0,26)
D	1,55	1,51	1,55	1,51	1,52	0,25	0,07	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	1,48	0,25
E	0,88	0,92	0,68	0,85	0,80	(2,82)	(6,49)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	(1,27)	(1,33)
F	2,57	2,40	2,16	2,36	2,20	(1,92)	(1,44)	0,14	0,13	0,48	0,21	0,28	23,31	51,47
G	1,65	1,48	1,61	1,52	1,55	0,59	1,42	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,19	(0,12)
H	1,04	0,71	0,69	0,75	0,68	(3,50)	(0,58)	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	(1,66)	(3,68)
I	0,80	0,74	0,74	0,75	0,75	(0,65)	(0,95)	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	(0,97)	(2,88)
J	0,91	0,71	0,61	0,71	0,65	(4,00)	(2,68)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	(1,82)	(0,90)
K	1,09	0,70	0,83	0,78	0,73	(1,79)	3,84	0,12	0,09	0,11	0,10	0,10	0,77	5,33
L	0,84	0,66	0,64	0,68	0,63	(2,23)	(0,34)	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	1,03	(0,01)
M,N	0,64	0,57	0,51	0,55	0,52	(2,23)	(2,19)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	(0,91)	(0,31)
O	2,98	2,34	2,29	2,39	2,28	(1,93)	(0,26)	0,17	0,18	0,19	0,18	0,19	1,17	0,63
P	2,58	2,23	2,20	2,26	2,18	(1,20)	(0,23)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	1,00	(0,00)
Q	2,75	2,22	2,04	2,22	2,09	(2,21)	(1,48)	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	1,27	1,22
R,S,T,U	0,83	0,73	0,72	0,74	0,71	(1,34)	(0,16)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,34	(0,04)

Lanjutan Tabel 5.

Kode	Kabupaten Fakfak							Kabupaten Kaimana						
	Tahun			Rerata Nilai LQ		Rerata Growth		Tahun			Rerata Nilai LQ		Rerata Growth	
	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020
A	2,00	1,79	1,77	1,82	1,77	(1,42)	(0,44)	3,39	2,91	2,86	3,02	2,85	(2,06)	(0,30)
B	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,76	(1,34)	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	4,96	4,61
C	0,14	0,13	0,12	0,13	0,12	(1,37)	(0,78)	0,22	0,20	0,20	0,21	0,20	(1,36)	(0,74)
D	1,76	1,44	1,25	1,40	1,32	(2,92)	(3,24)	1,75	1,64	1,71	1,71	1,72	(0,37)	(0,09)
E	2,21	2,03	1,93	2,05	1,97	(1,47)	(1,22)	0,64	0,49	0,46	0,51	0,47	(3,55)	(1,95)
F	2,85	2,20	2,02	2,23	2,02	(3,06)	(0,65)	1,45	1,43	1,47	1,42	1,41	0,36	0,82
G	2,32	2,06	1,82	2,01	1,87	(2,13)	(2,04)	1,84	1,68	1,62	1,67	1,61	(1,02)	(0,32)
H	2,59	2,16	2,12	2,21	2,10	(1,98)	(0,11)	2,49	2,07	1,97	2,11	1,98	(2,54)	(0,95)
I	1,96	2,04	1,94	1,99	1,94	(0,54)	(0,94)	1,34	1,31	1,34	1,34	1,34	(0,06)	0,44
J	2,09	1,76	1,62	1,77	1,66	(2,71)	(1,52)	1,18	1,07	0,97	1,06	1,00	(2,17)	(1,74)
K	1,27	1,03	1,07	1,07	1,01	(1,60)	0,96	1,10	1,01	1,04	1,04	1,03	(0,67)	0,16
L	2,39	2,07	1,83	2,03	1,89	(2,68)	(2,56)	1,92	1,84	1,59	1,78	1,69	(2,13)	(3,45)
M,N	1,96	1,75	1,71	1,76	1,67	(1,38)	(0,02)	0,79	0,74	0,76	0,75	0,75	(0,48)	0,20
O	2,48	2,16	2,03	2,17	2,08	(1,87)	(1,14)	2,76	2,63	2,24	2,51	2,38	(2,33)	(2,60)
P	2,47	2,18	2,09	2,20	2,10	(1,92)	(0,86)	0,85	0,77	0,83	0,80	0,80	(0,61)	1,25
Q	2,09	1,87	1,72	1,87	1,77	(1,89)	(1,79)	1,03	0,94	1,03	0,97	0,97	0,06	1,94
R,S,T,U	1,22	1,25	1,17	1,22	1,19	(0,78)	(1,30)	1,68	1,56	1,65	1,61	1,61	(0,26)	0,84

Lanjutan Tabel 5.

Kode	Kabupaten Maybrat						
	Tahun		Rerata Nilai LQ		Rerata Growth		
	2010	2015	2020	2011-2020	2016-2020	2011-2020	2016-2020
A	3,39	3,35	3,04	3,32	3,13	(2,06)	(1,93)
B	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	4,80	1,89
C	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	(1,19)	(1,24)
D	0,87	0,85	0,78	0,84	0,81	(1,10)	(2,46)
E	0,60	0,53	0,39	0,52	0,47	(4,54)	(7,29)
F	1,45	1,24	1,21	1,24	1,20	(1,11)	(0,15)
G	1,17	1,07	0,97	1,03	0,98	(1,67)	(1,47)
H	0,79	0,61	0,60	0,63	0,58	(2,75)	0,35
I	0,43	0,40	0,39	0,40	0,39	(1,09)	(1,34)
J	0,17	0,15	0,14	0,15	0,14	(2,05)	(0,12)
K	1,81	1,34	1,80	1,44	1,38	1,34	9,66
L	0,58	0,43	0,39	0,44	0,39	(3,84)	(1,45)
M,N	0,38	0,33	0,33	0,34	0,33	(1,12)	0,04
O	4,96	4,18	4,20	4,28	4,20	(1,22)	0,31
P	1,62	1,35	1,34	1,42	1,34	(2,20)	(0,19)
Q	1,12	0,96	0,85	0,95	0,87	(2,81)	(2,09)
R,S,T,U	0,25	0,24	0,22	0,23	0,22	(1,79)	(1,22)

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pola aktivitas ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat memiliki kemiripan satu sama lain selama periode 2010 – 2020. Analisis dengan menggunakan pendekatan SLQ diperoleh bahwa sektor basis untuk kabupaten induk di Provinsi Papua Barat memiliki kemiripan kecuali Kabupaten Sorong. Namun, *trend* pertumbuhan SLQ diperoleh bahwa kabupaten induk di Provinsi Papua Barat kecuali Kabupaten Sorong mengalami penurunan kemandirian pada sebagian sektor dalam perekonomian.

### Saran

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi terkait hasil analisis yang diperoleh, antara lain:

1. Kemandirian sektor pada kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat perlu untuk ditingkatkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki setiap daerah.

2. Penurunan kemandirian sektor pada kabupaten induk di Provinsi Papua Barat perlu untuk diantisipasi dengan kebijakan sektoral yang dapat meningkatkan output.
3. Perlu adanya *road map* bagi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyerap tenaga kerja semakin banyak namun kontribusi terhadap PDRB semakin kecil sehingga dapat meningkatkan produktivitas pada sektor ini.
4. Sebagai Provinsi Konservasi, Provinsi Papua Barat perlu membuat roadmap pembangunan ekonomi yang mampu memanfaatkan nilai jasa dari lingkungan, sehingga sektor jasa perlu didorong untuk meningkatkan aktivitas ekonominya.
5. Perlu ada riset lanjutan untuk melihat keunggulan kompetitif dan komparatif dari setiap sektor di Kabuapten/Kota di Provinsi Papua Barat.

## REFERENSI

- ADB. (2013). *Asia's Economic Transformation: Where to, How, and How Fast? - Key Indicators for Asia and the Pacific 2013 Special Chapter*. Asian Development Bank.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Edisi Pert). BPFE.
- Baransano, M. A., Putri, E. I. K., Achzani, N. A., & Kolopaking, L. (2016). Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 27(2), 119–136.
- BPS Papua Barat. (2021a). *[Seri 2010] Distribusi Persentase PDRB (Persen), 2019-2020*. Badan Pusat Statistik Papua Barat. <https://papuabar.bps.go.id/indicator/52/230/1/-seri-2010-distribusi-persentase-pdrb.html>
- BPS Papua Barat. (2021b). *[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB (Persen), 2019-2020*. Badan Pusat Statistik Papua Barat. <https://papuabar.bps.go.id/indicator/52/231/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb.html>
- BPS Papua Barat. (2021c). Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Agustus 2020. *Badan Pusat Statistik Papua Barat*.
- Castells-Quintana, D., & Royuela, V. (2014). Agglomeration, inequality and economic growth. *The Annals of Regional Science*, 52(2), 343–366.
- Chenery, H., Robinson, S., & Syrquin, M. (1986). *Industrialization and Growth: A Comparative Study*. Oxford University Press.
- Currie, L. (1974). The “Leading Sector” Model of Growth in Developing Countries. *Journal of Economic Studies*, 1(1), 1–16.
- Delgado, M., Porter, M., & Stern, S. (2014). Clusters, convergence, and economic performance. *Research Policy*, 43(10), 1785–1799.
- Felipe, J., Kumar, U., & Abdon, A. (2014). How rich countries became rich and why poor countries remain poor: It's the economic structure...duh! *Japan and the World Economy*, 29, 46–58.
- Hanson. (2005). Market potential, increasing returns and geographic concentration. *Journal of International Economic*, 67(1), 1–24.
- Hanson, J. (1976). The Leading Sector Development Strategy and the Importance of Institutional

- Reform: A Reinterpretation. *Journal of Economic Study*, 3(1), 1–12.
- Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–199.
- McCann, P., Arita, T., & Gordon, I. (2002). Industrial clusters, transactions costs and the institutional determinants of MNE location behaviour. *International Business Review*, 11, 647–663.
- Njøs, R., & Jakobsen, S.-E. (2016). Cluster policy and regional development: scale, scope and renewal. *Regional Studies, Regional Science*, 3(1), 146–169.
- Putra, I. J., Sirojuzilam, & Rujiman. (2017). Analysis of Leading Sector in Rokan Hulu Regency, Riau Province, Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 6(1), 116–123.
- Rahman, A. ., Sabri, & Arsyad, M. (2020). Leading Sectors and Regional Specialization: Learn from Indonesian Economy. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1650–1663.
- Rodrik. (2013). Unconditional Convergence in Manufacturing. *The Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 165–204.
- Safri, M., & Rachmadi, S. (2017). Leading sector development in Muaro Jambi District. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 35–50.
- Satrianto, A., & Sasongko, B. (2019). Determination Of The Same Leading Sectors In Blitar City. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 12(2), 382–402.
- Soebagiyo, D., & Hascaryo, A. S. (2016). Leading Sectors 15 Countries-Districts in Central Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 74–83.
- Timmer, M., de Vries, G., & de Vries, K. (2015). Patterns of structural Change in Developing Countries. In J. Weiss (Ed.), *Routledge Handbook of Industry and Development*. Routledge.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN.
- Yu, N., De Jong, M., Storm, S., & Mi, J. (2012). Transport Infrastructure, Spatial Clusters and Regional Economic Growth in China. *Transport Reviews*, 32(1), 3–28.